

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan kebutuhan terpenting bagi kehidupan manusia, dengan begitu setiap manusia memiliki wawasan yang lebih luas lagi dan memiliki bekal ilmu pengetahuan untuk kehidupannya di kemudian hari. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat (1) menjelaskan tentang pendidikan yang merupakan usaha yang sudah direncanakan untuk mewujudkan proses pembelajaran dalam mengembangkan potensi kecerdasan, spiritual, akhlak mulia, keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, bangsa dan negara. Pendidikan merupakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah antara pendidik dan peserta didik. Walaupun pendidikan sudah menjadi kebutuhan terpenting setiap manusia, tetapi tetap saja masih banyak yang belum mendapatkan pendidikan di Indonesia. Reni, wakil ketua komisi X DPR RI menyorot angka anak putus sekolah yang terjadi di Indonesia sesuai data Survei Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2017, bahwa jumlah anak putus sekolah di desa lebih besar yaitu 1,43 persen dibandingkan jumlah anak putus sekolah di kota yang berjumlah 0,92 persen (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2019). Salah satu faktor anak putus sekolah di Indonesia menurut Najeela (dalam Shemi, 2019) adalah faktor kondisi anak berkebutuhan khusus yang berjumlah 6.008.661 orang atau 2,45 persen dari jumlah penduduk di Indonesia. Dengan kondisi anak berkebutuhan khusus yang berbeda dengan anak reguler mengharuskan anak berkebutuhan khusus untuk

bersekolah di sekolah yang menyediakan layanan khusus sesuai dengan kemampuan mereka.

Sesuai dengan *World Declaration On Education For All* (1990) yang dilaksanakan pada tanggal 5–9 Maret 1990 di Jomtien, Thailand, yang dihadiri dengan berbagai negara dan organisasi saling bertemu dan mengadakan Konferensi Dunia yang membahas mengenai *Education for All* (EFA) atau Pendidikan Untuk Semua (PUS), setiap manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan termasuk anak berkebutuhan khusus. Pada tahun 2000 merupakan tahun kelanjutan dari program pendidikan terpadu di Indonesia yang sebelumnya pernah diterapkan pada tahun 1980-an, karena kurang berkembang barulah di tahun 2000 diterapkan kembali dengan mengikuti perkembangan dunia dengan menerapkan konsep pendidikan inklusif (Garnida, 2015). Dengan disepakati Pendidikan Untuk Semua (PUS) atau *Education For All* (EFA) merupakan salah satu upaya pemerataan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, ras, agama, dan golongan. Setiap Warga Negara tanpa terkecuali memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan baik formal maupun non formal, anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak yang sama dengan anak reguler lainnya untuk mendapatkan pendidikan.

Berdasarkan berita yang ditulis oleh Twin pada tanggal 6 November 2017, bahwa salah satu perwujudan dari Pendidikan Untuk Semua (PUS) atau *Education For All* (EFA) adalah diselenggarakannya layanan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi merupakan layanan pendidikan yang sebelumnya sudah disusun secara terencana untuk memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus dapat melakukan kegiatan belajar mengajar bersama dengan anak reguler lainnya di

sekolah reguler untuk mengembangkan pengetahuan, pengalaman dan potensi yang dimilikinya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memperkirakan hampir 70% anak berkebutuhan khusus tidak memperoleh pendidikan yang layak. Berdasarkan data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2017 menyebutkan bahwa jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia adalah sebanyak 1,6 juta orang. Artinya, sekitar satu juta lebih ABK belum memperoleh pendidikan yang memiliki arti penting bagi kehidupannya (Purba, 2019).

Pada layanan pendidikan inklusi, peserta didik yang berkebutuhan khusus akan mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama dengan anak reguler mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Menurut Najelaa (dalam Nilawaty, 2019) bahwa hal terpenting yang didapatkan dalam pendidikan inklusi adalah interaksi yang terjadi antara anak berkebutuhan khusus dengan anak reguler yang dapat menambah pengetahuan dan intelektual pada masing-masing anak. Tujuan dari pada pendidikan inklusi adalah untuk mendorong partisipasi anak berkebutuhan khusus kepada masyarakat, sehingga tidak ada membeda-bedakan layanan pendidikan dalam pemberian layanan kepada masyarakat.

Selain itu, pendidikan inklusi juga dapat menjadi alternatif bagi anak berkebutuhan khusus untuk bersekolah di sekolah reguler dan dapat menambah akses pendidikan yang lebih luas kepada anak berkebutuhan khusus. Menurut Lukitasari, dkk (2017) sekolah inklusi dimaksudkan untuk memperpendek akses pendidikan bagi ABK yang biasanya bertempat tinggal jauh dari pusat kota dimana terdapat SLB sehingga mereka tidak mengalami putus sekolah. Pada

semester ganjil 2019/2020, berdasarkan Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat hanya ada 13 sekolah SLB yang ada di Bali. Dengan adanya sekolah inklusi, orang tua tidak kesulitan lagi mencari sekolah untuk anaknya yang berkebutuhan khusus, karena ada sekolah reguler yang menjadi alternatif bagi anak yang berkebutuhan khusus.

Pada layanan pendidikan inklusi sudah mulai dibangun pada layanan lembaga di PAUD, sehingga sejak dini anak berkebutuhan khusus mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara dengan anak reguler lainnya dalam menyalurkan potensi yang dimiliki anak sejak lahir. Menurut Helda (2016) pendidikan inklusi sebaiknya diterapkan sejak di PAUD karena memiliki manfaat yang dapat menambah wawasan bahwa di lingkungan kita ada individu yang mempunyai hambatan, selain itu kita dapat menambah rasa percaya diri kepada diri sendiri, teman atau siapapun untuk lebih bersyukur lagi kepada Tuhan. Sama dengan anak reguler lainnya, anak berkebutuhan khusus juga perlu dibantu dalam merangsang pertumbuhan dan perkembangannya sehingga potensi yang dimilikinya dapat tersalurkan.

Layanan pendidikan inklusi yang menjadi dasar diterapkan di PAUD adalah manajemennya. Manajemen yang diterapkan di PAUD inklusi tidak dapat dipisahkan dengan manajemen pendidikan pada umumnya. Menurut Shofa (2018) Manajemen pendidikan inklusi di PAUD dapat dimulai dari (1) penyusunan visi, misi dan tujuan PAUD dengan setting inklusi, (2) penyusunan program penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan Inklusi, (3) Penerimaan peserta didik dengan setting inklusi, (4) pemahaman tentang keberagaman karakteristik

ABK (Anak Berkebutuhan Khusus), (5) penyusunan kurikulum dan bahan ajar, (6) menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM), (7) mempersiapkan sistem pembelajaran dan pelaporan perkembangan anak, (8) Penyediaan sarana dan prasarana, (9) kerjasama dengan pihak lain, dan (10) monitoring dan evaluasi program PAUD Inklusi. Sedangkan yang menjadi dasar penyelenggaraan dari PAUD adalah dapat menerima anak-anak dengan berbagai latar belakang sosial, suku, ras, budaya dan kemampuan. Pada pendidikan inklusi, semua anak reguler dan anak berkebutuhan khusus tergabung dalam satu kelas yang sama saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan kurikulum yang sama dan penambahan program khusus sesuai dengan kebutuhan sekolah. Sesuai dengan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar, bahwa terdapat 19 sekolah PAUD Inklusi yang berada di Kota Denpasar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah pasal 1 ayat (15) yang menyatakan, pendidikan khusus yang diterapkan di madrasah merupakan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kesulitan dalam proses pembelajar karena memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Layanan pendidikan inklusi mulai memberdayakan *madrasah* sebagai layanan pendidikan yang akan menyandarkan agama menjadi bagian dari mempersiapkan generasi untuk menumbuhkan rasa keimanan yang berlandaskan agama Islam. Namun masih banyak *madrasah* yang belum memiliki aturan dan kebijakan mengenai pendidikan inklusi. Hasil penelitian Sholikhah (2016) di Kementerian Agama,

implementasi pendidikan inklusi belum menjadi prioritas untuk diwujudkan karena kementerian agama masih berfokus pada hal-hal pendidikan yang lainnya. Tetapi walaupun masih banyak *madrasah* yang belum memiliki aturan dan kebijakan mengenai pendidikan inklusi tetap saja ada yang menerapkannya di *madrasah*.

Pada sekolah inklusi yang berbasis Islam memberikan materi Pendidikan Agama Islam kepada siswanya merupakan upaya yang tidak didapatkan di sekolah reguler. Hasil dari wawancara yang dilakukan Nurussalihah (2016) dengan guru pendidikan khusus yang ada di SDN Mojorejo 1 dan SDN Junrejo 01 menjelaskan bahwa materi yang disampaikan adalah bagaimana cara berwudhu, tata cara sholat, menghafal surat-surat pendek, memahami rukun Islam dan rukun iman. Materi yang diberikan tersebut diharapkan dapat menambah iman siswa terhadap pengetahuan *fiqih* dan aqidah akhlak siswa berkebutuhan khusus. Dengan pemberian pengetahuan mengenai *fiqih*, diharapkan anak dapat melaksanakan sholat dalam kehidupannya sehari-hari. Pengetahuan aqidah akhlak yang diberikan bertujuan agar anak dapat membedakan perbuatan yang baik dilakukan atau perbuatan buruk yang tidak baik dilakukan, tingkah laku yang baik kepada orang tua, guru dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sesuai dengan data yang ada, jumlah siswa berkebutuhan khusus di SDN Mojorejo 1 berjumlah 11 anak dengan berbagai ketunaannya yaitu tunagrahita ringan, tuna wicara, kesulitan belajar, autism, down syndrome dan tuna ganda. Di SDN 01 Junrejo siswa berkebutuhan khususnya berjumlah 27 anak dengan ketunaan yang berbeda pula, yaitu slow learner, gangguan konsentrasi, tunagrahita, down syndrome, tuna daksa, ADHD dan autism.

Tidak hanya pemberian materi saja yang diberikan kepada siswa berkebutuhan khusus, tetapi juga pembiasaan yang dilakukan anak di sekolah, yaitu melaksanakan sholat dhuha sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Seperti yang dilakukan siswa di SDN Mojorejo 1 pada hari sabtu pagi, sebelum memulai pendidikan agama islam siswa melaksanakan sholat dhuha terlebih dahulu. Sama dengan yang dilakukan siswa di SDN Mojorejo 1, siswa di SDN Junrejo 01 juga melaksanakan sholat dhuha dan mengaji bersama sebelum pembelajaran dimulai yang biasanya dilakukan pada hari kamis pagi dan melaksanakan sholat dhuhur di siang harinya.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian pada TK yang berbasis pendidikan Islam di Kota Denpasar yang merupakan Ibu Kota Provinsi Bali dimana Agama Islam merupakan minoritas di Bali. Peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana interaksi sosial yang terjadi antara siswa reguler dengan siswa berkebutuhan khusus, serta bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran yang terjadi pada PAUD inklusi berbasis pendidikan Islam yang berada di Kota Denpasar. Untuk mendapatkan data PAUD Inklusi dengan berbasis pendidikan Islam, peneliti melakukan observasi sesuai dengan data yang didapat dari Departemen Agama Kota Denpasar, tercatat ada 18 nama sekolah *raudhatul athfal* (RA) atau TK yang berbasis pendidikan Islam yang ada di Kota Denpasar. Sedangkan yang tercatat sebagai sekolah yang memiliki siswa berkebutuhan khusus dari tahun ketahun hanya ada 1 sekolah RA, yaitu RA Anak Emas. Sesuai data yang didapat dari Departemen Agama Kota Denpasar, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di RA Anak Emas.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti di RA Anak Emas pada tahun 2020 tercatat ada 9 kelas, 5 kelas untuk kelompok A dan 4 kelas untuk kelompok B dengan jumlah siswa 121 dan 5 siswa berkebutuhan khusus dengan jenis yang berbeda, yaitu down syndrome, autis dan ADHD. Kegiatan yang dilakukan siswa di RA Anak Emas pada pagi hari dimulai pukul 8 pagi dengan pemberian sambutan awal, kemudian briefing pagi yang diawali dengan berbaris, hafalan doa, surat-surat dan hadist. Setelah itu dilanjutkan dengan mengaji menggunakan metode tibyan, istirahat, pembelajaran dengan sentra, recalling, persiapan pulang dan diakhiri pada pukul 12 siang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis melaksanakan penelitian tentang bagaimana interaksi antara siswa reguler dengan siswa berkebutuhan khusus, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran yang diterapkan di PAUD inklusi berbasis pendidikan Islam kepada siswa di RA Anak Emas Kota Denpasar. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Program PAUD Inklusi Berbasis Pendidikan Islam: Studi Kasus Di RA Anak Emas Kota Denpasar”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan di RA Anak Emas Kota Denpasar yang dijadikan bahan penelitian adalah sebagai berikut.

- 1.2.1 Keberagaman latar belakang kondisi dan perkembangan anak sehingga menyebabkan adanya kebutuhan khusus dan hambatan dalam belajar yang berbeda.
- 1.2.2 Keterbatasan sekolah paud inklusi yang berbasis Islam masih sedikit.

1.2.3 Pendidikan inklusi membutuhkan perencanaan pendidikan yang dapat menerima anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi.

1.3 Pembatasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan agar peneliti berfokus pada topik penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka penelitian ini lebih difokuskan pada pembelajaran yang diterapkan di PAUD Inklusi berbasis pendidikan Islam kepada siswa yang berada di RA Anak Emas Kota Denpasar.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka dirumuskan permasalahan bagaimana pembelajaran yang diterapkan di PAUD Inklusi berbasis pendidikan Islam kepada siswa yang berada di RA Anak Emas Kota Denpasar?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembelajaran yang diterapkan di PAUD Inklusi berbasis Pendidikan Islam kepada siswa yang berada di RA Anak Emas Kota Denpasar.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1.6.1 Manfaat Hasil Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi bidang keilmuan pendidikan anak usia dini terutama untuk mengetahui lebih dalam

bagaimana penerapan pendidikan inklusi anak usia dini dan proses pembelajaran pada pendidikan inklusi di PAUD yang berbasis Islam.

1.6.2 Manfaat Hasil Praktis

Selain manfaat teoretis, penelitian ini juga memiliki manfaat hasil praktis yaitu sebagai berikut.

a) Bagi Kepala Sekolah

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi untuk pertimbangan kedepannya dalam mengambil keputusan terkait pelaksanaan pembelajaran di PAUD inklusi yang berbasis Pendidikan Islam.

b) Bagi Guru

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi untuk pertimbangan kedepannya dalam mengambil keputusan terkait proses pembelajaran di sekolah inklusi.

c) Bagi Penulis Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran ilmu untuk menjadi referensi dan dapat mengadakan inovasi baru terkait pembelajaran Pendidikan Islam di sekolah inklusi.